

# KELEMBAGAAN PETANI KOPI DI DESA SUKAMANAH, SINDANGKASIH, KABUPATEN CIAMIS

*(Coffee Farming Institutions in Sukamanah Village, Sindangkasih, Ciamis Regency)*

**Sanudin<sup>1</sup>, Suhartono<sup>2</sup>, Ary Widiyanto<sup>3</sup>, Maria Palmolina<sup>4</sup>, Dila Swestiani<sup>5</sup>,  
Nana Sutrisna<sup>6</sup>, Srita Nursuse Febianti<sup>7</sup>**

Jl Raya Ciamis-Banjar Km 4 PO BOX 5 Ciamis 46201 Telp. (0265)771352, Fax. (0265)775866  
<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Agroforestry  
Email: sanevafa2014@gmail.com

Diterima 21 September 2021, direvisi 9 November 2021, disetujui 24 November 2021

## ABSTRACT

*Forestry partnership is a form of social forestry management that provides space for larger communities to be involved in forest management. This study aims to overview the condition of coffee farming institutions in the social forestry program. This research was conducted in May 2021 at the Forest Village Community Institute (LMDH) Sarimukti, Sukamanah Village, Sindang Kasih District, Ciamis Regency. This LMDH was chosen because it has obtained a Social Forestry permit for the Recognition of Forestry Partnership Protection (KULIN KK) scheme. The results showed that institutionally, LMDH Sarimukti has a good condition because it already has statutes (AD) and bylaws (ART) and each part of the organization has carried out their respective duties and functions and the community gets many benefits from its existence so that it is expected to encourage community participation in achieving the goals of social forestry management in the KULIN KK scheme. Socially and economically, the community has started to feel the benefits of the KULIN KK scheme of social forestry management through the production of coffee and other crops. Permission to access arable land through the SK KULIN KK provides assurance and comfort for the community to be involved in forest management.*

**Keywords:** *instituiton, farmer, coffee*

## ABSTRAK

Kemitraan kehutanan merupakan salah satu bentuk pengelolaan perhutanan sosial yang memberikan ruang kepada masyarakat yang lebih besar untuk terlibat dalam pengelolaan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kelembagaan petani kopi dalam program perhutanan sosial. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2021 di Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sarimukti, Desa Sukamanah, Kecamatan Sindang Kasih Kabupaten Ciamis. LMDH ini dipilih karena sudah memperoleh izin PS skema Pengakuan Perlindungan pada program Kemitraan Kehutanan (KULIN - KK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara kelembagaan, LMDH Sarimukti mempunyai kondisi yang baik karena sudah mempunyai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan tiap-tiap bagian organisasi sudah menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dan masyarakat mendapat banyak manfaat dari keberadaannya sehingga diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan perhutanan sosial skema KULIN KK. Secara sosial dan ekonomi, masyarakat sudah mulai merasakan manfaat pengelolaan perhutanan sosial skema KULIN KK melalui hasil dari kopi maupun tanaman lainnya. Izin untuk mengakses secara lahan garapan melalui SK KULIN KK memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam terlibat dalam pengelolaan hutan.

**Kata kunci:** kelembagaan, petani, kopi

## I. PENDAHULUAN

Perubahan terkini dalam tata kelola kehutanan nasional yang mendukung dan

mengakui hak masyarakat lokal untuk menguasai hutan mereka, sebelumnya dikendalikan oleh perusahaan kayu dan

lembaga negara, memungkinkan masyarakat lokal untuk menegosiasikan kembali kontrak kehutanan yang ada pengaturan kemitraan dengan perusahaan kayu (Gabay dan Alam 2017). Akomodasi terhadap preferensi masyarakat dalam merancang pengelolaan hutan dapat mempengaruhi kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan (Pirard *et al.*, 2017).

Salah satu bentuk pengelolaan Perhutanan Sosial (PS) menurut Peraturan Menteri LHK No 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan PS adalah kemitraan kehutanan. Kemitraan disini dilakukan antara pemegang izin dengan Perum Perhutani, selaku pemegang kawasan hutan Perhutani. Sahide *et al.* (2020) menyebutkan bahwa skema kemitraan menawarkan mekanisme yang berbeda dan lebih fleksibel, dimana kemitraan ini memberi ruang untuk menentukan aturan mereka sendiri, terutama terkait durasi pengelolaan, membuka kemungkinan untuk merestrukturisasi pengaturan pembagian manfaat, dan memungkinkan kesepakatan independen tentang penyelesaian sengketa dan sanksi. Menurut Maryudi dan Sahide (2017), skema kemitraan juga memberikan ruang bagi keragaman pengaturan dan memungkinkan implementasinya baik pada kawasan hutan negara atau hutan hak.

PS di wilayah kerja Perum Perhutani menurut Peraturan Menteri LHK No 39 tahun 2017 didefinisikan sebagai sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk izin pemanfaatan hutan. PS di Perum Perhutani diberikan dalam bentuk Izin Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dan Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ciamis,

Kesatuan KPH Ciamis yang didominasi oleh pinus sudah mendapatkan izin perhutanan sosial melalui skema KULIN KK.

Kopi merupakan jenis yang banyak diminati oleh masyarakat dalam implementasi di lapangan. Agar dapat menjalankan pengelolaan PS dengan baik memerlukan dukungan kelembagaan yang baik pula. Kelembagaan memainkan fungsi penting dalam pengelolaan hutan karena kelembagaan berfungsi sebagai wadah, panutan, dan menyediakan pola bagi proses pengelolaan hutan (Nikoyan *et al.* 2020).

Karena fungsinya tersebut, sebagai suatu organisasi, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) harus memiliki kelembagaan yang baik agar tujuan bersama dapat tercapai. Sebaliknya jika kelembagaan tidak berjalan dengan baik maka petani sebagai anggotanya akan menghadapi kendala dalam setiap tahapan kegiatan dalam PS. Selain itu, kelembagaan pasar juga sangat penting dalam menunjang aktivitas petani dalam PS. Rantai pemasaran menjadi cerminan untuk memprediksi keuntungan ekonomi yang diperoleh oleh petani dalam program PS. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kelembagaan petani kopi dalam program perhutanan sosial. Kondisi kelembagaan ini meliputi organisasi (kelengkapan dan fungsinya) serta kelembagaan pasar hasil produk perhutanan sosial, khususnya kopi.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2021 di LMDH Sarimukti, Desa Sukamanah, Kecamatan Sindang Kasih Kabupaten Ciamis. LMDH ini dipilih karena sudah memperoleh izin PS skema KULIN KK. Penelitian ini merupakan studi kasus yang berusaha menjelaskan, menganalisis, dan memahami suatu kasus dengan menggunakan berbagai sumber data (Creswell, 2007). Data primer yang

dikumpulkan antara lain adalah data organisasi kelompok tani dan data karakteristik umum responden yang terdiri dari kondisi sosial-ekonomi responden. Data ini didapatkan melalui wawancara menggunakan kuesioner terhadap 90 responden yang merupakan anggota LMDH dan wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) terhadap pihak-pihak terkait seperti Perum Perhutani KPH Ciamis, perangkat desa, pendamping dan pengurus LMDH dan melalui pengamatan lapangan. Data sekunder yang dikumpulkan antara lain berupa data monografi desa, data wilayah administrasi LMDH dan data lainnya. Data ini dikumpulkan dari berbagai lembaga seperti desa, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Perum Perhutani KPH Ciamis. Semua data yang diperoleh diolah kemudian dianalisis menggunakan analisis studi kasus yaitu dengan cara data dikelola, dibaca, dikelompokkan, diinterpretasikan, dan disajikan dengan menggunakan narasi, tabel, dan gambar (Creswell, 2007).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kondisi Umum Responden

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas petani penggarap berjenis kelamin laki-laki dan mayoritas hanya memiliki tingkat pendidikan dasar (SD/SMP). Sebagian besar responden berprofesi sebagai petani, meskipun ada juga yang memiliki pekerjaan utama sebagai pedagang, karyawan swasta, guru ngaji dan aparat desa. Dengan total wilayah garapan sekitar 108 ha, maka rata-rata lahan garapan per petani adalah sekitar 0,8 ha.

Pengeluaran atau pola konsumsi responden masih didominasi pemenuhan kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang dan papan. Untuk kesehatan, responden umumnya menggunakan jasa bidan desa dan pusat kesehatan masyarakat baik dengan berlangganan BPJS maupun mandiri. Kebutuhan air sebagian responden terpenuhi oleh fasilitas *Water Sanitation for Low*

*Income Community* (WASLIC) dengan biaya yang sangat rendah mulai Rp 6.000/bulan. Sebagian lagi menggunakan sumber air alami dari hutan yang mengalir ke perkampungan.

Kegiatan PS di lahan Perhutani berbasis kopi di LMDH Sarimukti mulai dilaksanakan tahun 2018, jadi pada saat kegiatan penelitian ini dilaksanakan tanaman kopi rata-rata berumur 3 tahun. Petani umumnya melaksanakan semua tahapan penanaman sesuai prosedur operasional standar (SOP) Perhutani yang meliputi tahapan pembukaan lahan, persiapan lahan, pembersihan, pemupukan, pengendalian hama penyakit, pemangkasan dan penyulaman tanaman yang mati. Tahapan pembukaan lahan dan penyiangan/pembersihan merupakan tahapan yang paling memakan waktu dengan kisaran lebih dari 1 bulan.

Pada saat penititan ini dilaksanakan, sebagian petani sudah memanen kopi mereka, meskipun hasilnya belum maksimal. Mereka rata-rata baru panen beberapa puluh kg saja. Bahkan ada beberapa yang belum panen sama sekali. Perawatan yang terdiri dari penyiangan (pembuangan gulma), pengendalian hama penyakit dan pemupukan berpengaruh terhadap hasil panen mereka. Semakin intensif maka akan semakin besar jumlah panen kopinya. Meskipun demikian sebagian petani tidak memberikan pupuk atau memberi pupuk dalam jumlah sedikit terhadap tanaman kopi mereka. Hal ini disebabkan mayoritas petani tidak memiliki modal untuk membeli pupuk.

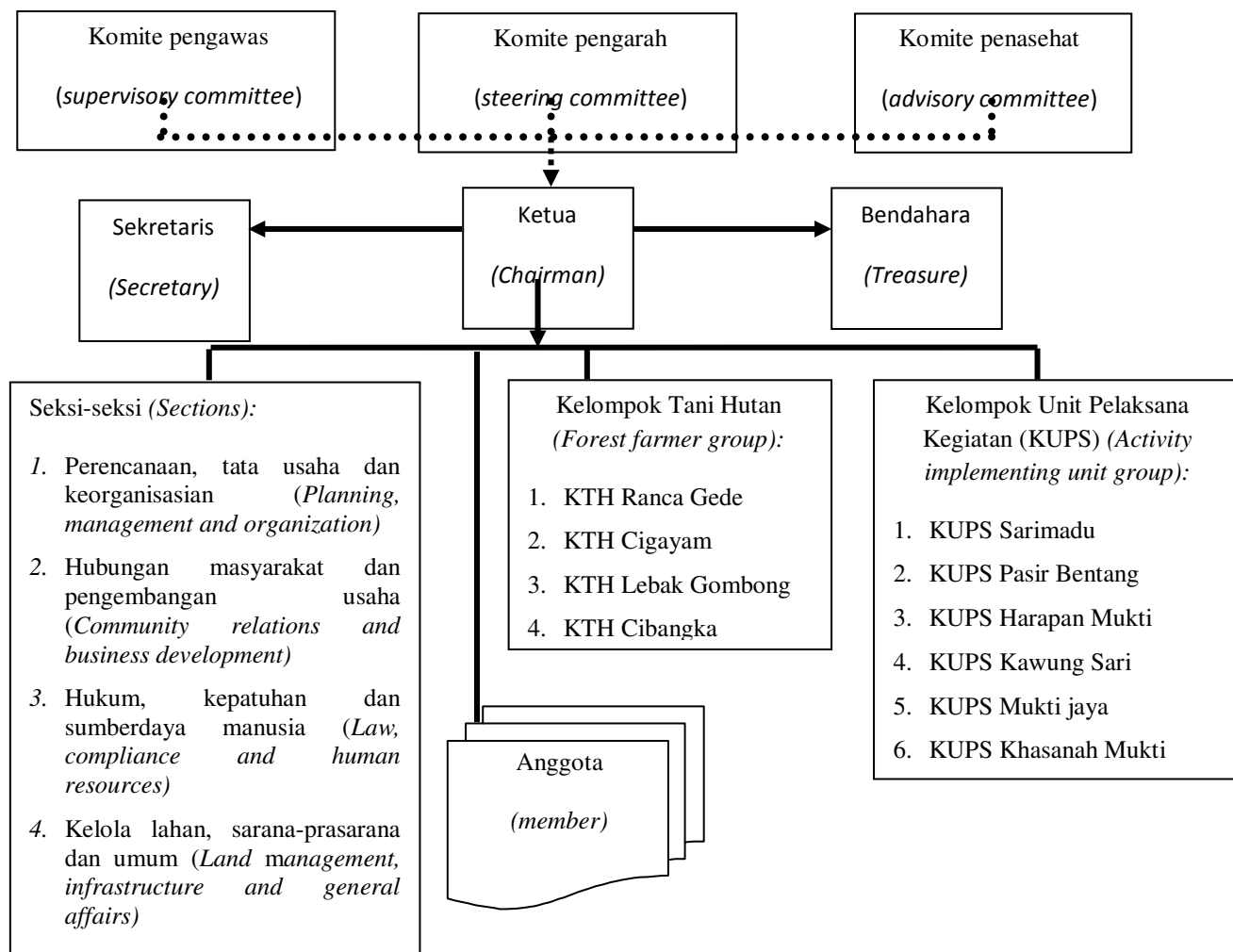
#### B. Karakteristik Organisasi

LMDH Sarimukti termasuk dalam wilayah Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Cikoneng BKPH Ciamis KPH Ciamis. Kawasan hutan tersebut terbagi menjadi 2 petak yakni petak 47 dan 48. Petak 47 tersebut dibagi lagi menjadi 4 (empat) anak petak (AP) seluas 58,94 ha dan petak 48 dibagi menjadi 9 (sembilan) AP seluas 76,99 ha.

LMDH ini dibentuk dan didirikan pada tahun 2007 setelah dilakukan sosialisasi

program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) oleh Perum Perhutani, namun baru memiliki legalitas hukum (akta pendirian oleh notaris) pada tanggal 20 Nopember 2009. LMDH ini terdiri dari 5 (lima) Kelompok Tani Hutan (KTH) yaitu, KTH Ranca Gede, KTH Cigayam, KTH Lebak Gombong, KTH Cibangka, dan KTH

Cinarimbang dan terdiri dari 9 (sembilan) Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dengan tugas atau fokus yang berbeda-beda, seperti wisata, pembibitan, pengolahan, produksi, pemasaran dan sebagainya. Stuktur organisasi LMDH Sarimukti dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur organisasi LMDH Sarimukti  
(Figure 1. Organizational structure of LMDH Sarimukti)

LMDH ini sudah mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) sebagai aturan main dalam berkelompok yang mencakup tujuan kelompok, keanggotaan, hak dan kewajiban, larangan, dan sebagainya. Sifat keanggotaan bersifat mengikat bagi masyarakat yang mempunyai lahan garapan di

kawasan Perum Perhutani. Beberapa aturan kelompok terkait dengan lahan garapan di kawasan hutan diantaranya adalah: mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, memelihara dan tidak menebang pohon yang ada.

Kelompok tani menurut Nikoyan et al. (2020) dapat memberikan manfaat bagi

anggota kelompok berupa baik manfaat individu seperti tukar pengalaman dalam usaha tani, bertukar keterampilan kerja dalam bertani, dapat menambah penghasilan; maupun manfaat kelompok meliputi kerjasama antar sesama anggota tani, pengolahan lahan secara terencana dan kolektif, dan menambah modal usaha tani yang lebih besar. Demikian halnya dengan LMDH pada penelitian ini yang menurut masyarakat mempunyai manfaat baik bagi individu maupun kelompok.

Pengurus LMDH merupakan masyarakat yang didominasi oleh pemuda-pemuda desa yang termotivasi untuk memajukan desanya dari sisi ekonomi dengan tetap menjaga keberadaan hutan yang didominasi pinus. Komite pengarah pengurus LMDH ini merupakan mantan kepala desa dan saat ini dipercaya oleh Perum Perhutani menjadi pendamping semua LMDH yang ada di KPH Ciamis. Komite pengarah ini mempunyai kemampuan dan kapasitas dalam mengarahkan LMDH agar tujuan keterlibatan masyarakat dalam program PS memberikan manfaat baik sosial, ekonomi dan ekologi. Kemampuan komite pengarah LMDH tersebut diperoleh melalui hasil pelatihan baik yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, maupun Perum Perhutani.

Sumber keuangan lembaga saat ini berasal dari iuran anggota, anggaran Desa Sukamanah, dan bantuan lainnya yang tidak mengikat. Sumber keuangan lembaga di atas masih belum bisa mencukupi seluruh kebutuhan dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan lembaga. Adapun kekurangan anggaran untuk pembiayaan kegiatan lembaga selama ini dengan adanya swadaya anggota.

### C. Kegiatan Yang Telah Dilakukan

Kegiatan awal yang telah dilakukan oleh LMDH adalah melakukan sosialisasi awal tentang PHBM bersama Kepala Sub Seksi (KSS) PHBM KPH Ciamis. Sosialisasi tahap awal ini dilaksanakan khusus masyarakat Desa Sukamanah yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi berikutnya tentang PHBM serta fungsi dan manfaat hutan terhadap kelangsungan hidup masyarakat dan lingkungan, dengan melibatkan pejabat Perhutani KPH Ciamis. Dalam kurun waktu selama 11 tahun sejak berdirinya lembaga, LMDH Sarimukti telah melaksanakan beberapa kegiatan kelembagaan yang secara ringkas tergambar dalam keterangan seperti disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kegiatan LMDH Sarimukti sampai dengan tahun 2020  
(Table 1. LMDH Sarimukti activities until 2020)

No	Tahun (year)	Kegiatan (activity)
1.	2007	dengan dibantu oleh Perum Perhutani melakukan penguatan kelembagaan dengan pembentukan dan penokohan lembaga.
2.	2009	bekerjasama dengan Perhutani yang diikat dengan perjanjian kerjasama (PKS) dengan cakupan luas 109 ha dari luas hutan pangkuan desa sukamanah sekitar 137 ha dan merekondisi bekas tebangan di sebagian lahan dengan tanaman pinus dan tanaman tumpangsari palawija
3.	2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ melakukan perubahan kepengurusan karena ketua LMDH menjadi Kepala Desa Sukamanah sehingga ditunjuk ketua pengganti</li> <li>➢ atas inisiatif kepala Desa LMDH Sarimukti mengajukan PKS Komoditi kepada Perhutani untuk penanaman Kopi dibawah tegakan dengan luas yang diajukan 109 Ha</li> </ul>
4.	2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ terbit Peraturan Menteri LHK Nomor 83 tentang perhutanan sosial, maka pengajuan PKS Komoditi dilanjutkan dengan pengajuan Perhutanan Sosial dan menunggu terbit SK menteri tentang perhutanan sosial LMDH Sarimukti dengan skema Kulin KK.</li> <li>➢ kegiatan pembibitan kopi arabika sebanyak 60.000 pohon dan kopi robusta sebanyak 8.500 pohon untuk musim tanam awal 2017</li> <li>➢ mendapatkan bantuan bibit kopi dari Gubernur Jawa Barat sebanyak 24.000 pohon untuk musim tanam awal 2017</li> </ul>

No	Tahun (year)	Kegiatan (activity)
5.	2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ menanam kurang lebih 84.000 pohon kopi arabika dan 8.500 kopi robusta di wilayah hutan pangkuan desa (HPD) Desa Sukamanah dengan mendasarkan kerjasama dengan perhutani pada PKS HPD yang dibuat tahun 2009, sementara program perhutanan sosial dalam proses</li> <li>➤ mendapatkan lagi bantuan bibit kopi arabika dari gubernur sebanyak 71.000 pohon dan kopi robusta sebanyak 5.000 pohon</li> </ul>
6.	2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ mengembangkan usahanya dibidang wana wisata yang di kelola oleh KUPS Pasir Bentang dalam wana wisata rintisan dalam areal lahan yang dalam rencana pengembangan wisata seluas 2 ha</li> <li>➤ mengembangkan pengelolaan hasil panen kopi yang di kelola oleh KUPS Mitra Mukti bahkan dalam upaya mempromosikan produk dari LMDH Sarimukti ini dibuat kedai dengan tempatnya pada areal rintisan wana wisata</li> <li>➤ proses penyusunan RKU dan RKT dan direncanakan ada pengkayaan tanaman dalam program pelestarian di areal jona perlidungan, maka dimulai dikembangkan penyemaian bibit tanaman perkebunan dan MPTS yang dikelola oleh KUPS Khasanah Mukti</li> </ul>

Kegiatan penanaman kopi dimulai sejak tahun 2018, dan sampai saat ini sudah ditanam sebanyak 245.000 bibit kopi.

Realisasi kegiatan penanaman kopi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Realisasi kegiatan penanaman kopi oleh LMDH Sarimukti sampai dengan tahun 2020  
(Table 2. Realization of coffee planting activities by LMDH Sarimukti until 2020)

No	Varietas	s/d tahun 2018	Tahun 2019/ 2000	Jumlah bibit	Perkiraan luas (ha) s/d 2020	Keterangan
1	Arabika	155.000	70.000	225.000	90	95% lahan Perhutani
2	Robusta	13.500		13.500	5,4	90% lahan milik
3	Lokal inisiatif masyarakat	5.500	1.000	6.500	2,6	Tersebar
	Jumlah	174.000	71.000	245.000	98	

Tahapan pembukaan lahan dan penyiangan/pembersihan merupakan tahapan yang paling banyak memerlukan waktu dengan kisaran lebih dari 1-3 bulan. Pada kedua tahapan ini, mayoritas petani selain menggunakan tenaga kerjanya sendiri (keluarga), juga menggunakan tenaga kerja tambahan (orang lain) dengan upah sebesar Rp 50.000/hari untuk laki-laki dan Rp 35.000/hari untuk perempuan dengan waktu kerja jam 07.00-13.00. Kisaran jarak lahan di Perhutani dari rumah masyarakat bervariasi mulai dari 500 m – 5 km yang ditempuh baik dengan jalan kaki dan atau menggunakan sepeda motor.

Bibit kopi yang ditanam baik arabika maupun kopi robusta sebagian besar merupakan bantuan dari Perum Perhutani, petani hanya mengganti biaya angkut/transportasi dari persemaian yang ada di desa ke lokasi masing-masing sebesar Rp 100 – Rp 300/bibit kopi. Selain menanam kopi pada lahan Perhutani, petani juga menanam kopi pada lahan mereka sendiri (kebun, pekarangan). Jumlah keseluruhan bibit kopi yang ditanam anggota LMDH Sarimukti pada lahan sekitar 245.000 bibit yang sebagian besar ditanam pada tahun 2019, ada juga yang ditanam pada tahun 2020 dan 2021. Selain kopi, petani juga menanam berbagai macam sayuran seperti kucai,

cabe dan jenis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti kapulaga dan buah-buahan sebagai sumber pendapatan lain atau untuk konsumsi pribadi (subsisten).

Sebagian besar petani sudah mulai memanen kopi, meskipun hasilnya belum terlalu banyak karena kopi sedang/baru belajar berbuah, namun ada juga petani yang belum memanen kopinya. Rata-rata jumlah kopi yang dipanen bervariasi, namun sebagian besar di bawah 100 kg per petani. Sebagian petani menjual kopi dalam bentuk *cherry bean* (belum dikupas) dan sebagian lain menjual dalam bentuk *green bean* atau sudah dikupas dan dikeringkan. Rendemen kopi dari bentuk *cherry bean* menjadi *green bean* adalah sekitar 4-7 kg berbanding 1 kg. Jenis kopi robusta memiliki rendemen yang lebih besar dibandingkan dengan kopi arabika, meskipun harga jual kopi robusta (Rp 40.000/kg) lebih rendah dibandingkan kopi arabika (Rp 80.000/kg).

Sejak penanaman kopi mulai tahun 2019 sampai saat ini, hampir semua petani belum mendapatkan keuntungan secara finansial dari hasil penjualan kopi. Bahkan petani harus mengeluarkan biaya untuk kegiatan mulai dari pembukaan lahan, persiapan lahan, pemupukan, penyiangan dan pengendalian hama dan penyakit. Untuk saat ini, kegiatan yang paling besar memerlukan biaya adalah kegiatan pemupukan dan penyiangan (pembersihan lahan). Sebagian besar petani lebih banyak menggunakan pupuk kimia (Urea dan NPK) dibandingkan dengan pupuk kandang karena kemudahan pengangkutan (untuk dosis penggunaan yang sama lebih sedikit dibandingkan dengan pupuk kandang). Sebagian petani memperoleh pendapatan dari penjualan sayuran dan kapulaga meskipun dalam jumlah sedikit, sehingga belum bisa menutupi biaya kegiatan penanaman kopi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, petani juga memiliki pekerjaan selain mengelola lahan gaparan pada lahan Perhutani seperti

bertani di kebun sendiri, buruh tani, dan sebagainya. Terkait kegiatan LMDH, mayoritas petani ikut serta secara aktif dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh LMDH seperti pertemuan rutin bulanan, bimbingan teknis budidaya kopi, teknik pengendalian hama dan penyakit tanaman, pengolahan pasca panen dan berbagai kegiatan LMDH lainnya. LMDH juga pernah beberapa kali melakukan kegiatan terkait pengelolaan kopi melalui kerjasama dengan pihak lain seperti penyuluh pertanian, pengusaha kopi, Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Semua petani masih menghadapi kendala diantaranya adalah permodalan, yang sangat mereka perlukan untuk pembelian pupuk dan pemeliharaan (penyiangan). Selain itu beberapa kendala yang masih petani hadapi antara lain serangan binatang perusak khususnya babi hutan, sumber air untuk kegiatan pertanian, pemasaran hasil dengan harga jual yang memadai, dan teknik pengolahan produk agar memiliki nilai tambah. Bahruzin *et al.*, (2014) menyatakan bahwa permasalahan permodalan dapat dilakukan dengan pembentukan lembaga usaha yang dapat berpartisipasi dalam skema pembiayaan/bantuan permodalan yang ada. Berdasarkan karakteristik, lembaga usaha yang sesuai dengan LMDH adalah lembaga yang berbentuk koperasi. Karakteristik koperasi sebagai lembaga usaha yang berbasis keanggotaan menjadi pilihan yang tepat dalam pengembangan LMDH. Keterkaitan LMDH dengan koperasi terletak pada keanggotaan, dimana anggota koperasi merupakan individu yang menjadi anggota LMDH. Namun demikian pengelolaan/kepengurusan LMDH dan koperasi dilakukan secara independen.

Meskipun belum memperoleh hasil dari kopi mayoritas petani beranggapan bahwa kegiatan PS ini menguntungkan

buat mereka. Selain mendapat kesempatan untuk mengolah lahan negara, sebagian dari mereka juga mendapatkan hasil dari tanaman sela seperti jenis sayuran dan kapulaga. Selain itu, mereka menganggap bahwa kopi merupakan investasi jangka panjang yang akan mereka nikmati hasilnya secara rutin mulai tahun kelima. Petani juga mengharapkan bagi hasil dari penjualan getah pinus oleh Perhutani, disamping upah penyadapan getah yang diterima oleh sebagian petani yang juga berprofesi sebagai penyadap getah.

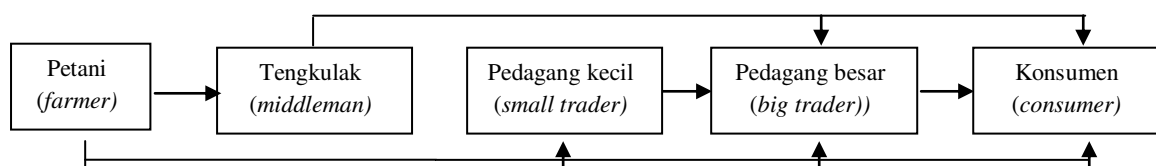
Terbitnya SK Menteri LHK Nomor: SK.1646/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.O/3/2019 tentang KULIN KK LMDH Sarimukti tahun 2019 juga membuat petani merasa tenang dengan status lahan garapan mereka. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Ota (2021) untuk studi kasus di KPH Kendal (Jawa Tengah) yang menyebutkan bahwa sebagian besar petani merasa diuntungkan dengan adanya program ini karena mendapatkan izin akses legal ke lahan garapan selama 35 tahun.

Sebagian petani sudah memahami perbedaan dan perubahan antara skema PHBM berbasis Perjanjian Kerjasama (PKS) sebelum tahun 2019 dan PS

KULIN KK. Pemahaman tersebut diantaranya terkait jenis-jenis yang boleh dimanfaatkan atau tidak dari kawasan hutan, meskipun terdapat perbedaan pandangan terkait boleh-tidaknya menanam kayu di lahan garapan. Menurut Raharjo *et al.*, (2020) yang mengidentifikasi dinamika kelembagaan di KPH Telawa Jawa Tengah, struktur kelembagaan skema IPHPS atau KULIN KK lebih kompleks dibandingkan dengan PHBM namun secara kelembagaan tidak ada yang berbeda dari keduanya.

#### D. Kelembagaan Pemasaran

Petani umumnya menjual kopi kepada pedagang pengumpul yang ada di Tasikmalaya (PT Zanzibar) baik secara langsung maupun melalui fasilitasi LMDH Sarimukti, namun ada juga yang menjual hasil panen kopinya ke kedai kopi yang dikelola oleh salah satu unit usaha LMDH Sarimukti (KUPS). Pedagang pengumpul yang ada di Tasikmalaya dapat menampung berapapun hasil panen kopi petani dan harga jual ditentukan oleh pedagang pengumpul. Kelembagaan pemasaran kopi di Desa Sukamanah disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Kelembagaan pemasaran kopi di Desa Sukamanah  
(Figure 2. Coffee marketing institutions in Sukamanah Village)

Saat ini, LMDH Sarimukti secara rutin tiap dua minggu mendapatkan kegiatan pendampingan kegiatan PS dari Kementerian LHK melalui pendamping dari Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Nusa Tenggara. Untuk KPH Ciamis terdapat 2 tenaga pendamping. Kegiatan

pendampingan PS ini secara umum mempunyai tujuan membantu percepatan program PS dalam penyebarluasan informasi secara timbal balik berkaitan dengan tujuan pendekatan dan implementasi berbagai kegiatan perhutanan sosial di tingkat tapak, menyediakan sebuah kerangka kerja bagi para



pendamping dalam membantu masyarakat penerima izin. Bahruzin et al., (2014) menyebutkan bahwa keberadaan pendamping ditujukan agar pengembangan LMDH dapat berjalan sesuai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

#### IV. KESIMPULAN

1. Secara kelembagaan, LMDH Sarimukti mempunyai kondisi yang baik karena sudah mempunyai AD dan ART dan tiap-tiap bagian organisasi sudah menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Selain itu masyarakat juga sudah mendapat banyak manfaat dari keberadaannya. Hal ini diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan perhutanan sosial skema KULIN KK.
2. Secara ekonomi dan sosial, masyarakat sudah mulai merasakan manfaat pengelolaan perhutanan sosial skema KULIN KK melalui hasil dari kopi maupun tanaman lainnya. Izin untuk mengakses secara lahan garapan melalui SK KULIN KK memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam terlibat dalam pengelolaan hutan.

#### UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Terima kasih kepada Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Agroforestry (BPPTA) Ciamis yang memfasilitasi penulis dalam melakukan penelitian tentang Kajian Model Agroforestri Lokal dan Kebijakan Pengembangannya; Dawan Hermawan (Perhutani KPH Ciamis), Dede Yuyu (Pendamping LMDH KPH Ciamis), dan pengurus LMDH Sukamukti yang banyak membantu pengumpulan data di lapangan

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bahruzin, Aceng Hidayat, and Eka Intan Kumala Putri. 2014. "Analisis Efektivitas Kelembagaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Utara Jawa Barat." *Jurnal Ekonomi Pertanian, Sumberdaya Dan Lingkungan* 1(1):1–11.
- Creswell, J W 2007. 2007. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. 2nd ed. California: Sage Publication).
- Gabay, M., Alam, M. 2017. "Community Forestry and Its Mitigation Potential in the Anthropocene: The Importance of Land Tenure Governance and the Threat of Privatization. *Forest Policy Econ.* 79, 26–35. [Http://Dx.Doi.Org/10.1016/j.Forpol.2017.01.79:26–35](http://Dx.Doi.Org/10.1016/j.Forpol.2017.01.79:26–35).
- Maryudi, A.; Sahide, M. A. 2017. "Research Trend: Power Analyses in Polycentric and Multi-Level Forest Governance." *Forest Policy Econ.* 81:65–68.
- Nikoyan, Anas, Safril Kasim, Zakiah Uslinawaty, and Rita Yani. 2020. "Peran Dan Manfaat Kelembagaan Kelompok Tani Pelestari Hutan Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya Nipa-Nipa." *Perennial* 16(1):34–39.
- Ota, M. 2021. "From Joint Forest Management to More Smallholder-Based Community Forestry: Prospects and Challenges in Java, Indonesia. *Journal of GJFR Volume 4 Nomor 1 April 2021, E-ISSN 2614-204X P-ISSN 2614-2058 35 Forest Research.*" *Journal of GJFR* 4(1).
- Peraturan Menteri, LHK. 2017. *Perhutanan Sosial Di Wilayah Kerja Perum Perhutani*. 39.
- Peraturan Menteri, LHK. 2021. *Pengelolaan Perhutanan Sosial*. Jakarta.
- Pirard, R., Petit, H., Baral, H. 2017. "Local Impact of Industrial Tree Plantations: An Empirical Analysis in Indonesia across Plantation Types." *Land Use Policy* 60:242–53.
- Sahide, Muhammad Alif K., Micah R. Fisher, Supratman Supratman, Yusran Yusran, Andita A. Pratama, Ahmad Maryudi, Yubelince Runtubei, Adrayanti Sabar, Bart Verheijen, Grace Y. Wong, and Yeon Su Kim. 2020. "Prophets and Profits in Indonesia's Social Forestry Partnership Schemes: Introducing a Sequential Power Analysis." *Forest Policy and Economics* 115(March):102160. doi: 10.1016/j.forpol.2020.102160.

SK Menteri LHK Nomor: SK.1646/MENLHK-  
PSKL/PKPS/PSL.O/3/2019 tentang  
KULIN-KK LMDH Sarimukti tahun 2019.  
2019. Jakarta.